

## UPTPK – MODEL JAWABAN PROBLEMATIKA KEMISKINAN DI KABUPATEN SRAGEN

### A. ANALISIS MASALAH (5 PERSEN dari nilai keseluruhan)

#### 1. Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakan inisiatif ini?

*“Uraikan situasi yang ada sebelum inisiatif ini dimulai, paling banyak 500 kata. Apa masalah utama yang perlu diselesaikan? Kelompok sosial mana saja, misalnya kelompok masyarakat miskin, buta huruf, penyandang cacat, manula, imigran, perempuan, pemuda, minoritas etnis, yang terpengaruh dan dalam hal apa”*

Indonesia sebagai sebuah negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Namun sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, kemiskinan masih menjadi problematika pelik yang mensusahkan banyak pekerjaan rumah. Menurut data TNP2K Tahun 2011, jumlah Rumah Tangga Miskin Indonesia sebanyak 24,5 juta. .

Sementara itu kondisi kemiskinan di Kabupaten Sragen menunjukkan beberapa masalah, yaitu:

- Warga miskin sebanyak 17,95% dari total warga masyarakat (Data Susenas 2011). Warga yang disebut miskin ini adalah mereka yang pengeluarannya maksimal Rp 280.488 per bulan atau Rp 9.350 per hari/kepala dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar tempat tinggal, kesehatan, pendidikan yang sangat minim dan tidak layak (14 kriteria kemiskinan BPS).
- Masih terdapat 62.109 Keluarga Miskin yang tinggal di **Rumah Tidak Layak Huni**.
- Bidang kesehatan**, Pemerintah sudah memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Tetapi terdapat 30% s/d 45% inclusion error dan exclusion error sehingga banyak warga mampu yang mendapatkan Jaminan, sebaliknya banyak warga miskin yang tidak mendapatkan. Tidak ada perhatian khusus terhadap warga miskin yang berpenyakit seperti gagal ginjal, sakit jiwa, dan penyandang cacat. Kepada mereka, tidak ada bantuan apapun jika meninggal dunia padahal masih ada rentetan ritual budaya berbiaya tinggi yang harus dilakukan berkaitan dengan kematian ini.
- Bidang pendidikan**, tidak ada program khusus dari Anggaran Daerah bagi siswa-siswa miskin SD, SLP, SMA, dan SMK yang tidak menjadi sasaran Beasiswa Siswa Miskin dari Anggaran Pusat. Tercatat sekitar 1500 (1,2%) siswa miskin yang tidak mendapatkan Beasiswa Siswa Miskin. Bagi yang ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi, warga miskin juga tidak mendapatkan jaminan bahwa orang tua mereka sanggup membiayai sampai lulus.

Bagi warga miskin di atas, **permasalahan utama yang dihadapi sebelum inisiatif ini dilakukan adalah:**

**Pertama**, tidak mempunyai informasi yang pasti, kepada siapa dan kemana mereka bisa mengajukan permasalahan kemiskinannya. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sering tidak sampai kepada mereka secara utuh. Juga, masyarakat miskin lebih memperhatikan bentuk bantuan apa yang akan mereka terima, daripada memperhatikan prosedur bagaimana bantuan itu bisa didapatkan.

**Kedua**, alur birokrasi yang panjang dan berbelit serta tidak terpadunya program penanggulangan kemiskinan. Contoh, untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu, agar memperoleh bantuan pembebasan biaya pengobatan, warga miskin harus melewati 8 kantor untuk menerima Surat tersebut, dan kembali lagi ke Dinas Kesehatan untuk

direkomendasikan menerima layanan Jaminan Kesehatan Daerah. Begitu juga untuk bisa direkomendasikan mendapatkan layanan pendidikan gratis, seorang siswa miskin harus memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu yang bisa diperoleh setelah melalui 6 kantor.

Banyak Satuan Kerja menawarkan bentuk bantuan yang sama. Bedah rumah, ada Dinas Pekerjaan Umum, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Sosial. Untuk beasiswa siswa miskin, **harus ke kantor yang mana, sebab ada** Bagian Kesra, Dinas Pendidikan, dan juga Badan Amil Zakat.

**Ketiga, tidak ada database kemiskinan tunggal** dan rekaman data penerimaan bantuan penerima manfaat, yang bisa diakses secara terbuka. Ini menyebabkan **pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di atas sering tidak tepat sasaran**. Satuan-satuan Kerja mempunyai database sendiri dan tidak sepakat siapa “si Miskin” yang harus dilayani untuk semua program penanggulangan kemiskinan yang dikerjakan.

## **B. PENDEKATAN STRATEGIS (25 persen dari nilai keseluruhan)**

### **2. Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah yang dihadapi?**

*“Paling banyak 600 kata, ringkasan inisiatif ini tentang apa dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah yang dihadapi. Juga uraikan strategi yang telah dilakukan, termasuk tujuan utama dan kelompok sasarannya.”*

Pemecahan masalah ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dibentuk untuk mewadahi gagasan-gagasan inovatif individual menjadi lebih sistemik dan terlembaga. Di dalamnya terdapat Bupati, Sekda, Asisten, dan Kepala Satuan Kerja yang berkompeten. FGD menganggap urgent adanya lembaga khusus yang berfungsi menerima aduan masyarakat miskin, memberikan solusi kepada mereka secara terpadu (kerjasama lintas SKPD), serta berfungsi sebagai fasilitator bagi Satuan-satuan Kerja dan instansi swasta dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Singkatnya, lembaga tersebut menjembatani pertemuan antara pihak pemberi layanan dan pihak penerima manfaat, dalam *satu pintu*. Lembaga tersebut adalah **Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK)**.

Pembentukan UPTPK memiliki landasan historis, mengingat kemiskinan adalah “bencana harian kronis” yang tampak jelas di depan mata. Analoginya, kalau **bencana alam** yang tidak di semua daerah menjadi peristiwa alam harian dengan frekwensi yang tidak terduga, Pemerintah mengamanatkan semua daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah meskipun sudah ada Dinas Sosial dan Badan Kesbangpolinmas. Demikian juga dengan **korupsi**, sudah ada Institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman, Pemerintah juga masih membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi, karena dirasakankorupsi adalah “bencana harian yang kronis”, “extraordinary crime”, tidak bisa diberantas oleh ketiga institusi di atas.

Dengan UPTPK, masyarakat miskin kini mempunyai “satu tempat” yang dituju untuk menyampaikan aduan atas masalah kemiskinan yang menghimpitnya. Tidak perlu lagi datang ke 6 hingga 8 kantor, masyarakat miskin cukup datang ke kantor UPTPK saja dan langsung mendapatkan solusi. **Pelayanan kemiskinan menjadi terpadu di satu pintu**, dilengkapi dengan instrumen survey kemiskinan yang valid, serta ditunjang oleh keberadaan *single database* kemiskinan yang selalu *up to date* dan bisa diakses secara terbuka, sehingga

program-program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terarah dan tepat sasaran.

**Beberapa strategi yang diterapkan** sehingga UPTPK dapat menjalankan fungsi di atas, yaitu **pertama, menjadikan UPTPK sebagai tujuan langsung dan tunggal** bagi masyarakat miskin untuk menyampaikan aduan permasalahan kemiskinan yang dialaminya, kemudian petugas akan menerima dan segera merespon. Ini diimbangi dengan sosialisasi gencar keberadaan UPTPK ke masyarakat miskin melalui rantai birokrasi sampai Camat, Lurah, dan RT, melalui media elektronik dengan Website UPTPK, yang didukung dengan keberadaan jaringan online dari semua Satuan Kerja Kabupaten sampai Kantor Camat dan Kantor Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Sragen.

**Kedua, memangkas alur birokrasi yang panjang dan berbelit dengan membentuk pelayanan terpadu satu pintu.** Masyarakat miskin cukup datang langsung ke kantor UPTPK dengan membawa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sragen. UPTPK adalah *One Stop Service* penanggulangan kemiskinan, melakukan sebagian kewenangan Satuan Kerja yang mempunyai kegiatan penanggulangan kemiskinan khususnya dalam hal verifikasi dan penetapan sasaran warga miskin. Eksekusi administrasi dan keuangan tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja masing-masing. **Point pentingnya: warga masyarakat miskin cukup datang ke UPTPK**, dan selanjutnya akan diselesaikan secara terkoordinasi dan paripurna dengan Satuan Kerja terkait.

UPTPK juga menggandeng BUMN/BUMD/Swasta dalam penyaluran bantuan penanggulangan kemiskinan baik dengan biaya promosi maupun dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Masyarakat miskin mempunyai akses yang lebih besar mendapatkan CSR ini dengan fasilitasi UPTPK.

**Ketiga, UPTPK menyusun database kemiskinan yang wajib dirujuk** (single data base) oleh Satuan-satuan Kerja dan Lembaga-lembaga swasta/masyarakat yang berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan. **Database ini kemudian termuat dan diolah dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penanggulangan Kemiskinan yang berbasis web** ([simsaraswati.sragenkab.go.id](http://simsaraswati.sragenkab.go.id)), terhubung ke semua Satuan Kerja, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Badan Amil Zakat, MATRA (Mitra Kesejahteraan Rakyat), Corporate Forum for Community Development, dengan otoritas akses sesuai kewenangan yang diberikan.

**Konsekuensi positifnya, siapa “Si Miskin” yang harus menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan semua Satuan Kerja dan Lembaga adalah menunjuk pada orang-orang yang sama.** Database ini selalu ditingkatkan validitasnya. Usaha tersebut dilakukan dengan survey untuk verifikasi lapangan bagi yang tidak termasuk dalam database TNP2K dan PPLS BPS. Di samping itu, UPTPK juga melakukan validasi kepada KK Miskin se-Kabupaten Sragen melalui tahapan-tahapan konfirmasi dari tingkat RT sampai Musyawarah Desa.

### 3. Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif?

*“Paling banyak 200 kata, ilustrasikan apa yang menjadikan inisiatif ini unik (unik?) dan bagaimana inisiatif ini telah menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang baru dan berbeda. Sebutkan pendekatan-pendekatan kreatif dan inovatif yang membuat inisiatif ini berhasil.”*

Pendirian UPTPK adalah inovatif original yang belum diterapkan daerah manapun di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan adalah **pertama: pendekatan kelembagaan, membentuk lembaga UPTPK** sebagai tempat bagi orang miskin untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan solusi.

**Ke dua: pendekatan sistem.** UPTPK adalah One Stop Service Penanggulangan Kemiskinan dengan paradigma baru pelayanan publik, agar lebih efektif dan efisien. **Sebelumnya**, warga miskin yang sakit untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu harus melalui 8 kantor. **Sekarang dipastikan** berdasarkan data atau survey lapangan, mereka diberikan Kartu Saraswati (identitas warga miskin) yang wajib mendapatkan layanan Kesehatan dan Sosial Ekonomi. **Sebelumnya** untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan, siswa miskin harus mempunyai SKTM dengan melalui 6 kantor. **Sekarang dipastikan**, siswa miskin diberikan Kartu Sintawati (identitas untuk siswa miskin) , yang wajib mendapatkan layanan Pendidikan.

**Selanjutnya, dibuat Sistem informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan.** **Sebelumnya**, data kemiskinan bersifat sektoral di masing-masing Satuan Kerja dan tidak mudah diakses. **Dengan SIM-PK**, data bersifat general, dan secara nyata teraplikasi didukung perangkat keras dan lunak yang dimiliki Pemkab Sragen yang menghubungkan keberadaan semua SKPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Puskesmas, Surat Maya dan Kantaya. Melalui SIM-PK, dapat diketahui program penanggulangan kemiskinan apa saja yang telah diterima oleh masyarakat miskin selama ini. Untuk menjamin kualitas, untuk masing-masing pelayanan sudah dibuat Standard Operating System.

## C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN (30 persen dari nilai keseluruhan)

### 4. Bagaimana strategi ini dilaksanakan?

*"Paling banyak 600 kata, uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan strategi ini, termasuk perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta kronologinya."*

*Unggah rencana pelaksanaan Anda (ukuran file maksimum 2 MB atau kurang dari 5 halaman)*

1. 2 Januari 2012, **membentuk UPTPK** dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012
2. 1 Mei 2012, **menunjuk personil PNS UPTPK** dengan Surat Tugas Bupati nomor 800/78/027
3. 27 Mei 2012, **Membuat Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (SIM PK) yang berbasis web.** Single database kemiskinan yang ada dapat diakses oleh semua Satuan Kerja dengan password bertingkat sesuai kewenangan masing-masing dengan SIM ini.
4. 27 Mei 2012, **meresmikan gedung khusus sebagai kantor UPTPK.** Kantor UPTPK bukan ruangan sisa yang disekat di pojok sebuah gedung kantor lain, tetapi memang sebuah gedung khusus untuk pelayanan terpadu kemiskinan. **Dilengkapi dengan sarana dan prasarana kantor**, seperti kursi tunggu tamu, motor survey, mobil ambulance, dan komputer masing-masing seksi yang terhubung online untuk mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan. Keberadaan Ambulance sangat berarti, karena dapat menjemput warga miskin sakit yang tidak punya biaya, untuk diantar ke Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah secara gratis (**layanan jemput bola**).

Sesuai Struktur Organisasi, kantor UPTPK dibuat meja-meja resepsionis penerima tamu dan loket-loket pelayanan untuk Seksi Kesehatan, Seksi Pendidikan, dan Seksi Sosial Ekonomi, serta Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat. Setelah syarat-syarat administrasi

dilengkapi, warga miskin cukup dilayani di 1 meja penerima tamu dan pengaduan, atau maksimal 2 meja di seksi masing-masing jika ingin mendapatkan informasi yang lebih detail.

Pelayanan Terpadu UPTPK terlihat di Tugas dan Fungsi seksi masing-masing. **Seksi Kesehatan** dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dan Puskesmas memberikan pelayanan kesehatangratis kepada masyarakat miskin. **Seksi Pendidikan** dengan Dinas Pendidikan dan Bagian Kesra memberikan bantuan beasiswa untuk jenjang SD, SMP, SMA/K, dan mahasiswa dari keluarga miskin.

**Seksi Sosial Ekonomi** dengan Dinas Tenaga Kerja membebaskan biaya bagi masyarakat miskin yang ingin magang ke Jepang. Dengan Badan Pendidikan dan Latihan, melatih ketrampilan kerja bagi masyarakat miskin. Dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, memberikan bantuan modal usaha. Dengan Dinas Sosial memberikan bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni dan Santunan Uang Kematian. Dengan Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan memberikan bantuan paket tanaman sayuran dan ternak itik untuk dikembangkan.

5. 12 Agustus 2012, membuat **Standard Pelayanan Minimal dan Standard Operating Procedure** untuk semua pelayanan di UPTPK dengan Surat Keputusan Bupati.
6. 15 Nopember 2012, mulai **menyusun dan membuat single database kemiskinan yang valid**. Data TNP2K, PPLS BPS, hasil survey, dan validasi data adalah 4 sumber yang dijadikan database kemiskinan UPTPK, wajib dijadikan referensi oleh Satuan Kerja Teknis, disebut dengan single database kemiskinan. **Siapa yang disebut miskin di Kabupaten Sragen akan menunjuk orang yang sama jika didekati oleh program-program penanggulangan kemiskinan dari banyak Satuan Kerja.**

**Sebelum UPTPK**, database kemiskinan mengandalkan database TNP2K 2012 dan PPLS 2011. Di dalamnya banyak warga masyarakat yang secara riil miskin tetapi tidak tercakup di dalamnya (**exclusion error**). Karena itu UPTPK mensurvey langsung warga yang bersangkutan (field survey). Jika miskin, kepadanya diberikan Kartu Saraswati untuk mendapatkan pelayanan kemiskinan. Untuk keperluan survey, **dibuat Form Survey dengan indikator dan skor yang jelas sehingga hasilnya lebih valid dan terukur.**

Terdapat juga warga yang mampu, namun masuk dalam database (**inclusion error**). Warga mampu kategori ini sering menimbulkan kecemburuan sosial di wilayah masing-masing jika dihadapkan pada mereka yang tergolong exclusion error. Oleh karena itu, UPTPK melaksanakan validasi ke semua warga masyarakat miskin di 208 desa/kelurahan. **Sampai saat ini, berdasarkan 35% data yang masuk, rerata error nya hampir 45% baik exclusion maupun inclusion error.** Jumlah total tetap, tetapi warga masyarakat yang digolongkan miskin lebih valid dan akurat. Metode validasi yang dipakai adalah scoring, listing, dan wawancara, dan diakhiri dengan Musyawarah Desa/Kelurahan.

7. 8 Desember 2012, **menerbitkan Kartu Saraswati dan Sintawati sebagai identitas warga miskin**. Dengan kartu ini, pelayanan kesehatan, sosial ekonomi dan pendidikan langsung dapat diakses, tidak perlu lagi membutuhkan banyak berkas lain.

## 5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?

*“Paling banyak 300 kata, sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inisiatif ini, termasuk pegawai negeri yang relevan, instansi pemerintah, organisasi, warga masyarakat, LSM, sektor swasta dan lain-lain.”*

**Ide dasar dari Bupati Sragen, dielaborasi dalam Focus Group Discussion (FGD)** beranggotakan Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bappeda, BPTPM, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kabag Ortala, Kabag Hukum, dan Kepala Kantor PDE, dan beberapa Satuan Kerja yang berkompeten.

**Pelaku utamanya adalah Pegawai Negeri UPTPK**, yaitu seorang Kepala, dibantu 1 orang Kasubag Tata Usaha, 3 orang Kepala Seksi Penanggulangan Berbasis Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial ekonomi, serta 1 orang Kepala Seksi Data Laporan dan Pengaduan Masyarakat. Didukung 18 PNS dari Satuan Kerja yang menangani program penanggulangan Kemiskinan. Di tingkat Kecamatan ada Kasie Kesejahteraan Rakyat yang memotori UPTPK Kecamatan.

**Satuan kerja yang terlibat adalah** Dinas Kesehatan, RSUD, dan Puskesmas sebagai pengampu Jaminan Kesehatan Daerah. Dinas Sosial, pengampu RTLH, Santunan Uang Kematian, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dinas Pendidikan, pengampu Beasiswa Siswa Miskin. Dinas Tenaga Kerja, pengampu Magang Jepang dan Pengentasan Pekerja Anak dan Putus Sekolah. Badan Diklat, pengampu ketrampilan masyarakat. Kantor Pengolah Data Elektronik, sebagai pendukung dan penyedia Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penanggulangan Kemiskinan, SIM Therapy Penanggulangan Kemiskinan, Website UPTPK ([uptpk.sragenkab.go.id](http://uptpk.sragenkab.go.id)), berbasis web. Bagian Kesra, pengampu Beasiswa Mahasiswa Miskin PTN di Pulau Jawa. Bagian Organisasi dan Kepegawaian serta Bagian Hukum, pendukung regulasi yang menyangkut dasar hukum UPTPK.

**Organisasi yang terlibat adalah** Corporate Forum For Community Development (CFCD) sebagai wadah penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Perbankan, BUMN/BUMD/Sektor Swasta yang berkomitmen pada penanggulangan kemiskinan. **LSM Himaseta** sebagai mitra yang ikut mengawasi dan memberi masukan konstruktif pelayanan UPTPK. **Mitra Kesejahteraan Rakyat** ([matra.sragenkab.go.id](http://matra.sragenkab.go.id)), sebagai pendukung dana non APBD (kepedulian PNS Sragen), **Badan Amil Zakat Sragen** ([www.bazsragen.org](http://www.bazsragen.org)). Bupati Sragen telah mendapatkan “BAZ Award” tahun 2014 karena telah mengintegrasikan data fakir miskin penerima zakat dengan data base kemiskinan UPTPK. Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU dengan lembaga-lembaga otonom di bawahnya juga banyak berpartisipasi.

**Warga masyarakat yang terlibat** adalah para Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK), **Bidan Desa, pengusaha, dan perseorangan.**

**6. Sumberdaya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumberdaya itu dimobilisasi?**

*“Paling banyak 500 kata, sebutkan biaya untuk sumberdaya keuangan, teknis dan manusiayang berkaitan dengan insiatif ini. Bagaimana proyek ini dibiayai dan siapa yang mendukung pembiayaan tersebut”*

**SUMBER DAYA KEUANGAN. Biaya operasional UPTPK** murni dari APBD Kabupaten melalui Bagian Kesra untuk pembiayaan biaya rapat, survey, dan juga biaya operasional Mobil Ambulance Saraswati. **Biaya program-program penanggulangan kemiskinan**, dijelaskan sebagai berikut: **Dana APBN** pada Jamkesmas, Raskin, RTLH (Kemenpera), dan Beasiswa siswa Miskin. **Dana APBD Propinsi** pada Jamkesda, Beasiswa siswa Miskin, dan RTLH. **Dana APBD Kabupaten** untuk Jamkesda, Rumah Tidak Layak Huni, Beasiswa Mahasiswa Miskin, dan Santunan Uang Duka Cita. Terdapat juga **Beaya Promosi/CSR** oleh BUMN/BUMD/BUMS, bisa pada biaya program-program di atas atau berujud bantuan sarana-prasarana UPTPK misalnya

mobil operasional, ambulance, komputer, papan nama kantor, neon box kantor, jalan khusus difabel, juga bisa bantuan langsung ke masyarakat miskin misalnya sembako murah, modal usaha, air bersih, RTLH, komputer, dan lain-lain. **Dana dari** Mitra Kesejahteraan Rakyat (**MATRA**) , yaitu wadah iuran/donasi dari para PNS khusus untuk pemugaran RTLH.

**UPTPK** juga dipercaya untuk ikut mengelola Sumbangan Sukarela dari Masyarakat atau Ormas atau Lembaga-lembaga lain pada program non kemiskinan, misalnya Sumbangan Air Bersih. Bersama dengan Dinas Sosial dan PDAM, UPTPK menerima dana sumbangan dan menyalurkan ke masyarakat/desa-desa yang rawan kekeringan.

**Pengelolaan** dana di atas dilakukan secara transparan dan tertib administrasi. Masyarakat dapat melihat apakah sumbangannya sudah diterimakan tepat sasaran atau belum, dengan besaran yang telah ditentukan.

**Sumberdaya manusia.** UPTPK dipimpin oleh seorang Kepala yang disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon III/a, yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala UPTPK dibantu oleh tiga Seksi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan, Berbasis Kesehatan, dan Berbasis Sosial dan Ekonomi, serta Seksi Data Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat yang setara dengan Pejabat Struktural Eselon IV/a dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTPK. Juga dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang setara Pejabat Struktural eselon IV/a, bertanggungjawab kepada Kepala UPTPK.

Adapun sampai saat ini jumlah SDM yang memperkuat UPTPK Kab. Sragen sebanyak 23 personil. UPTPK pada awal pembentukan personil diambil dari SKPD Teknis yang menangani pelayanan kemiskinan, berkompetensi dan berperformance yang baik, menguasai teknis proses pelayanan, dan memahami prinsip dasar pelayanan yang baik. Sebelum melaksanakan tugas pelayanan, para personil tersebut mendapatkan pembekalan dan pelatihan operasionalisasi komputer, training for success, bimbingan rohani, tata cara berpakaian dan berpenampilan menarik. Di tingkat UPTPK kecamatan, personil yang terlibat adalah semua Camat, Sekcam, dan Kasie Kesra di 20 Kecamatan, TSKS / PKH, dibantu dengan Perangkat desa dan Relawan sosial yang ada wilayah masing-masing.

**Sumberdaya Teknis.** Teknik-teknik yang dipakai di UPTPK di antaranya teknik pengolahan data yang lebih mengandalkan Teknologi Informasi yang terintegrasi dalam Sistim Informasi Penanggulangan Kemiskinan. Di samping perangkat komunikasi standard seperti telephone, komunikasi di Kabupaten Sragen juga menggunakan Surat Maya dan Kantaya (kantor maya) berbasis web yang menghubungkan semua Satuan Kerja, Kecamatan, dan Desa/kelurahan se-Kabupaten Sragen. Teknik-teknik pengumpulan data saat digunakan dalam survey/verifikasi dan validasi juga dikuasai, meskipun secara norma-norma statistik yang ideal tetap perlu dipelajari lebih lanjut oleh personil UPTPK. Selain itu, perangkat-perangkat lunak seperti Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan semua program penanggulangan kemiskinan juga dibuat. Demikian juga dengan Standard Operating System dan Standard Pelayanan Minimal untuk menjamin kualitas pelayanan. Diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat dengan pelayanan UPTPK mencapai skor 82.

## 7. Apa saja keluaran (output) yang paling berhasil?

*“Paling banyak 400 kata. Sebutkan paling banyak 5 keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inisiatif ini?”*

Beberapa keluaran kongkret UPTPK dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Sistim Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIM PK) berbasis web** untuk mengolah dan mengoperasikan data base kemiskinan. Tanpa SIM PK ini,

kinerja UPTPK tidak akan optimal. Dengan SIM PK, pelayanan warga miskin dapat dilakukan sejak mulai dari meja penerima tamu dan pengaduan, checking status kemiskinan warga bersangkutan, pencetakan kartu saraswati dan sintawati, dan checking semua layanan kemiskinan yang telah diperoleh semua warga miskin dari semua Satuan Kerja.

2. **Form Survey Lapangan** dengan indikator dan skoring untuk penentuan status kemiskinan warga yang membuat pengaduan. Form ini dibreakdown dari 14 kriteria kemiskinan Badan Pusat Statistik, agar lebih operasional dan terukur sehingga memudahkan petugas survey mengambil kesimpulan atas status kemiskinan dari akumulasi skor yang ada.
3. **Kartu Saraswati** untuk identitas warga miskin mendapatkan layanan kesehatan dan sosial ekonomi. Dengan kartu saraswati, **untuk layanan kesehatan** sampai pada tahun 2014 ini, telah dilakukan pelayanan kepada warga masyarakat miskin untuk berobat ke Pusat Pelayanan Kesehatan I (Puskesmas) sebanyak 151.460 orang, ke Pusat Pelayanan Kesehatan II (RSUD di Kabupaten Sragen) sebanyak 17.590 orang, dan ke Pusat Pelayanan Kesehatan III (Rumah Sakit di Surakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta) sebanyak 3.969. Kepada penderita gagal ginjal dari warga miskin, telah diberikan bantuan biaya Hemodialisa sebanyak 126 orang penderita, serta Pasien Sakit Jiwa sebanyak 530 orang. Semua warga miskin atau pasien sejumlah di atas, merupakan bagian dari semua warga miskin Sragen yang telah mendapatkan Kartu Saraswati Melati, Menur sebanyak 309.145 jiwa. Untuk **layanan sosial ekonomi**, sampai pada tahun 2014, telah diberikan bantuan untuk rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 6.718 unit, bagi ahli waris warga miskin diberikan Santunan Uang Duka Cita sebanyak 5.062 orang, dan warga miskin untuk Magang Jepang sebanyak 15 orang.
4. **Kartu Sintawati** untuk identitas warga miskin mengakses **layanan pendidikan**. Sampai pada tahun 2014 ini, telah diberikan rekomendasi bantuan pendidikan kepada siswa SMA/SMK/MA sebanyak 1041, Beasiswa Mahasiswa Miskin PTN di Pulau Jawa sebanyak 102 mahasiswa miskin, kepada anak-anak pekerja yang mengikuti program Pengurangan Pekerja Anak Program Keluarga harapan telah disalurkan kembali ke sekolah sebanyak 301 orang. Di samping itu telah diberikan bantuan beasiswa pada siswa SD/SMP/SMA/K yang tidak mendapatkan Anggaran Pusat sebanyak 111 orang. Sedangkan semua siswa miskin di Sragen sebanyak 87.810 telah diberikan Kartu Sintawati, yang sebagian besar digunakan untuk mendaftarkan ke sekolah-sekolah negeri yang diwajibkan Bupati Sragen untuk mengalokasikan kuota minimal 20% untuk siswa dari keluarga miskin.

8. **Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?**

*“Paling banyak 400 kata, uraikan bagaimana anda memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi ini.”*

Sebagaimana institusi birokrasi yang modern, setelah dilakukan aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan, maka dilakukan pula monitoring dan evaluasi, yang di UPTPK dilaksanakan sebagai berikut:

**Aspek waktu dan frekwensi.** Pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan adalah pola pelayanan baru, belum ada referensi dan best practice sebelumnya di manapun. UPTPK secara terus-menerus masih mencari bentuknya yang ideal. Oleh karena itu, monitoring dilakukan oleh internal UPTPK, setiap waktu terutama saat jam-jam sibuk pelayanan, untuk kemudian dilakukan evaluasi secara periodik setiap hari Kamis pagi. Banyak sekali inovasi-inovasi yang



dilahirkan dengan evaluasi rutin setiap hari Kamis pagi ini, seperti metode survey incognito, form survey yang lebih operasional, dan lain-lain. **Hasil evaluasi yang melahirkan inovasi baru kemudian dikomunikasikan ke Pejabat di level lebih tinggi di Focus Group Discussion.**

**Aspek program.** Monev program pelayanan di UTPK meliputi beberapa unsur yaitu program-program pelayanan yang dipadukan, bagaimana pelaksanaan di lapangan, terakhir apakah pelaksanaan pelayanan yang terpadu ini berdampak positif dalam penanggulangan kemiskinan. Ini biasanya dilakukan oleh Bupati, Sekda, Asisten Sekda, dan Kepala-kepala SKPD yang tergabung dalam Focus Group Discussion. Hasil laporan monev internal UTPK di butir a, dibahas di forum ini. FGD semacam ini sering melahirkan inovasi-inovasi turunan demi kesempurnaan UTPK seperti UTPK Kecamatan, Pakesra, MATRA, SIM Therapy Kemiskinan, dan lain-lain.

**Aspek Kegiatan.** Monev kegiatan pelayanan UTPK terfokus pada survey identifikasi warga /KK Miskin pemohon semua pelayanan UTPK (misalnya, pemohon Kartu Saraswati Menur, Beasiswa Mahasiswa Miskin, dan RTLH). Monev dilakukan dengan terlebih dahulu menyelia kelengkapan administrasinya (KK/KTP Sragen), dilanjutkan dengan survey lapangan untuk mengetahui realitas kondisi sosial-ekonomi pemohon, dilanjutkan dengan penentuan status kemiskinan pemohon berdasarkan skor tersebut. Saat survey, petugas dilengkapi dengan Form Survey Rumah Tangga Miskin. Form dibuat sendiri oleh para petugas UTPK menyesuaikan dengan 14 Kriteria Rumah Tangga Miskin, dibuat lebih operasional, dengan sistem skor, sehingga tidak hanya merupakan kesimpulan kualitatif yang dapat bias pada kesalahan analisa petugas UTPK.

Secara umum, untuk mendukung monitoring dan evaluasi kepada seluruh kegiatan penanggulangan kemiskinan di atas, dibackup dengan pembuatan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan ([simsaraswati.sragenkab.go.id](http://simsaraswati.sragenkab.go.id)) berbasis web yang bisa dipantau secara online oleh stakeholders dan masyarakat. Stakeholders dan masyarakat umum juga dapat melihat progress program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan melihat website UTPK ([uptpk.sragenkab.go.id](http://uptpk.sragenkab.go.id)) untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus menerima saran dan masukan. Telah dilakukan pula survey IKM (survey index kepuasan masyarakat).

**9. Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?**

*“Paling banyak 300 kata, sebutkan uraian masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan serta cara penanggulangan dan penyelesaiannya”*

Kendala yang dihadapi oleh UTPK dapat digolongkan menjadi:

**SATU, Belum diadopsinya database kemiskinan UTPK/Daerah ke dalam Database Kemiskinan Nasional.** Tidak ada jaminan bahwa database kemiskinan UTPK akan diakui oleh Pemerintah Pusat yang selama ini merujuk hasil Survey/Sensus BPS. Konsekwensinya, akan muncul kembali **exclusion error dan inclusion error**, yang sedang diminimalisir oleh UTPK dan Bappeda dengan proses validasi. **Akan selalu muncul orang miskin baru yang sudah dianggap mampu, sebaliknya akan muncul orang mampu baru yang masih dianggap miskin oleh tetangganya sendiri.** Contoh paling mutakhir dari problem ini adalah hasil verifikasi penerima Beras Miskin yang dilakukan oleh Bagian Sumber Daya Alam Setda

Kabupaten Sragen. Ketika melakukan verifikasi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat beras miskin atas instruksi TNP2K, tahun 2013 dan 2014, yang dikirim ke TNP2K, sampai sekarang belum mendapatkan tanggapan apapun. Ketika dikeluarkan Kartu Penjaminan Sosial (KPS BBM) daftar Rumah Tangga Miskin yang dijadikan penerima manfaat tidak sama dengan hasil verifikasi Bagian Sumber Alam Setda. **Penyelesaiannya** adalah mengusulkan dan mendesak Kantor BPS Kabupaten Sragen untuk menerima hasil validasi UPTPK dan Bappeda untuk diadopsi menjadi bagian dari database kemiskinan nasional.

**DUA, Konstruksi mental sosial budaya sebagian masyarakat yang tidak pro penanggulangan kemiskinan.** Banyak warga mampu yang tetap ingin menikmati anggaran-anggaran penanggulangan kemiskinan. Ini disebabkan karena semakin tingginya standard keberhasilan hidup dalam masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, gaya hidup, transportasi, dan lain-lain, namun tidak ditunjang dengan status kesejahteraan mereka yang memang benar-benar mampu dan berlebih. Di samping itu, memang terdapat perubahan negatif budaya masyarakat, banyak warga mampu yang tidak malu mengaku miskin untuk mendapatkan dana-dana dan fasilitas-fasilitas kemiskinan. Mereka sering merekayasa penampilan dirinya atau mengaburkan aset-aset yang dimiliki sehingga sulit terdeteksi petugas ketika survey lapangan. **Penyelesaiannya** adalah dengan mengetatkan verifikasi lapangan dan proses validasi untuk menentukan siapa Pemilik Kartu Saraswati yang benar-benar berhak.

#### **D. DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN (40 persen dari nilai keseluruhan)**

##### **10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini?**

*“Paling banyak 700 kata, uraikan dampak inisiatif ini. Berikan beberapa contoh konkrit bagaimana inisiatif ini berhasil membuat perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Uraikan bagaimana perbaikan pelayanan publik tersebut telah memberikan dampak positif kepada masyarakat. Jelaskan bagaimana dampak tersebut diukur.”*

**Beberapa dampak positif:**

- 1. Masyarakat miskin mendapat Kepastian tempat yang dituju, dengan prosedur yang mudah dan singkatnya waktu pelayanan.** Ketika mereka mempunyai problem dengan pelayanan kemiskinan, sudah ada tempat yang langsung dituju yaitu UPTPK. **Sebelumnya**, untuk mendapatkan rekomendasi perawatan rujukan ke PPK III di RSUD Dr. Muwardi di Surakarta, seorang warga miskin harus menghadapi minimal 8 meja dengan waktu minimal 4 hari, dengan kemungkinan terjadi pungutan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. **Contoh kongkrit**, Bapak Mulyadi pertama harus mendapatkan Surat Pengantar dari Ketua RT **(1)** untuk ke Kantor Desa/Kelurahan **(2)** agar dibuatkan Surat Pengantar ke Kecamatan **(3)** dan sekaligus menerangkan bahwa Mulyadi adalah warga tidak mampu. Setelah mendapatkan persetujuan Kasie Kesra Kecamatan atau Petugas PLKB bahwa dia benar-benar miskin, dia harus menemui dokter Puskesmas **(4)** tentang status kesehatannya. Setelah itu, dia harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan **(5)**, diteruskan mendapatkan persetujuan Kepala BKBPMMD **(6)**. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan Kepala Bappeda **(7)** untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu. Barulah kemudian, Mulyadi bisa kembali menemui petugas di Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi perawatan di PPK III oleh Kepala Dinas Kesehatan **(8)** dengan biaya APBD Kabupaten 40% dan APBD Propinsi 60%.

**Sesudah berdiri UPTPK**, semua warga yang termasuk dalam database TNP2K diberikan Kartu Saraswati Melati dan yang termasuk PPLS BPS 2011 serta mereka yang lolos survey langsung diberikan Kartu Saraswati Menur. Akhirnya jika ingin dirujuk ke PPK III RSUD dr. Muwardi Surakarta, Mulyadi cukup menunjukkan Kartu Saraswati di depan petugas resepsionis dan pengaduan, selanjutnya proses birokrasi mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan ditangani langsung oleh petugas dari Seksi Kesehatan UPTPK, paling lama 2 hari, gratis.

2. **Kesamaan data warga masyarakat miskin sebagai sasaran program penanggulangan masyarakat miskin semua Satuan Kerja.** Perbedaan data kemiskinan disebabkan indikator kemiskinan yang berbeda. **Sebelumnya**, terdapat banyak sebutan yaitu Keluarga Pra Sejahtera I dan II, KK Miskin, Rumah Tangga Sasaran, yang semuanya menjadi sasaran program Penanggulangan Kemiskinan. Masing-masing Satuan Kerja tidak sepakat tentang siapa warga miskin. **Contoh kongkret**, Supriyadi termasuk warga miskin versi Dinas Kesehatan, tetapi tidak termasuk dalam sasaran program Bedah Rumah di Dinas Sosial meskipun rumah-rumahnya benar-benar tidak layak huni. Namun oleh Pemerintah Pusat, Supriyadi dianggap miskin dan diberikan Kartu Jamkesmas. Bagi masing-masing Satuan Kerja ini bukanlah problem berdasarkan data yang dipegang masing-masing. Tetapi ini adalah problem bagi Supriyadi dan warga masyarakat lain terkait dengan siapa sebenarnya warga miskin yang harus mendapatkan pelayanan kemiskinan. **Sesudah berdiri UPTPK**, siapapun pemilik Kartu Saraswati Melati atau Menur, dia adalah warga miskin dan harus mendapatkan akses pelayanan kemiskinan sesuai kebutuhan urgent saat itu. Pemanfaatan single database ini menjadi optimal didukung keberadaan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan.
3. **Cakupan pelayanan yang lebih banyak dan terarah.**
  - a. **Bedah Rumah RTLH. Sebelum berdiri UPTPK**, ragam output di atas sudah banyak dihasilkan, namun masih bersifat parsial, tidak tepat sasaran, tidak berkelanjutan, tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan perencanaan tahun berikutnya, dalam jumlah yang sekedarnya. **Setelah berdiri UPTPK**, asas keterpaduan, keberlanjutan, dan ketepatan sasaran diutamakan. Contoh, sampai tahun 2011 jumlah RTLH di Kabupaten Sragen adalah 62.109 unit (data TNP2K), **sebelumnya** tidak ada program perbaikan RTLH yang massif dan terprogram. **Sesudah berdiri UPTPK**, sudah diperbaiki RTLH 1020 unit di Kecamatan Tangen, 1210 unit di Gemolong tahun 2013, dan 1500 unit di Sumberlawang tahun 2014. Bersama dengan program RTLH dari BAZ, MATRA, CFCD, Kemenpera dan sumber-sumber lain, pada tahun 2014 sudah diperbaiki RTLH sebanyak 6.715 unit sehingga tinggal menjadi 55.394 unit. Ini merupakan peningkatan yang signifikan.
  - b. **Sebelumnya tidak ada Beasiswa Mahasiswa Miskin di PTN**, yang ada adalah Beasiswa Mahasiswa Berprestasi untuk siapapun bahkan dari anak tukang becak sampai anak-anak pejabat. **UPTPK merubahnya** khusus untuk mahasiswa dari keluarga miskin, dengan menambah jumlah sasaran penerima tiap tahunnya dengan jumlah anggaran yang semakin besar.
  - c. **Program Magang Jepang, sebelumnya** Dinas Tenaga Kerja tidak mengalokasikan anggaran untuk warga miskin. **Sesudah berdiri UPTPK**, terdapat 15 orang warga miskin yang direkomendasi untuk mendapatkan bantuan biaya pengurusan passport visa, dan check up kesehatan.
  - d. **Program Pengurangan Pekerja Anak, sebelumnya** fasilitator program tidak bertanggungjawab apakah anak-anak pekerja itu kembali ke sekolah atau kembali ke jalan mencari nafkah. **Setelah berdiri UPTPK**, terdapat sekitar 301 anak putus

sekolah hasil rekomendasi fasilitator yang disalurkan UTPK untuk kembali ke sekolah.

4. **Angka Kemiskinan Menurun**, berdasarkan Data Susenas 2013, angka kemiskinan di Kabupaten Sragen menurun menjadi 15,09%.

11. **Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan dapat direplikasi?**

*“Paling banyak 500 kata, uraikan inisiatif ini sedang dilanjutkan (misalnya dalam hal berkelanjutan secara keuangan, sosial, dan ekonomi, budaya, lingkungan, kelembagaan dan peraturan). Jelaskan apakah inisiatif ini sedang direplikasi atau didesiminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat nasional dan/atau internasional dan/atau bagaimana inisiatif ini direplikasi.”*

Inisiatif ini terus dikembangkan dan akan terus dilanjutkan.

- a. **Segi keuangan**, disediakan sumber dana yang berkelanjutan. Jumlah anggaran penanggulangan kemiskinan sejak berdirinya UTPK **terus meningkat jumlahnya**.  
**Anggaran Jamkesda** tahun 2012: Rp 6.000.000.000; 2013: Rp 14.100.000.000; 2014: Rp 5.750.000.000, *untuk jumlah orang miskin yang sama (cakupan semakin meluas)*.  
**Anggaran beasiswa mahasiswa PTN** tahun 2012 : Rp 200.000.000; 2013: Rp 447.200.000; 2014 : Rp 668.800.000, *(jumlah mahasiswa miskin yang mendapat manfaat semakin banyak)*.  
**Anggaran bedah Rumah Tidak Layak Huni** tahun 2012 : Rp 4.039.500.000; 2013: Rp 4.844.000.000; 2014: Rp 8.300.000.000, *sehingga jumlah yang direhab semakin banyak*.  
**Anggaran Santunan Uang Kematian** tahun 2012 : Rp 649.500.000; 2013 : Rp 1.428.500.000; 2014 : Rp 453.000.000.  
**Anggaran magang jepang** 2013 : Rp 32.000.000. Dalam APBD 2015 juga sudah dianggarkan.
- b. **Segi peraturan**, menindaklanjuti terbentuknya UTPK, DPRD Kabupaten Sragen membuat Perda Inisiatif tentang Penanggulangan Kemiskinan yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013. Selain itu, terdapat 6 Peraturan Bupati Sragen yang diinisiasi oleh Satuan-satuan kerja yang mendukung keterlibatan UTPK dalam program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh mereka.
- c. **Segi kelembagaan**, Pemkab Sragen telah mengusulkan ijin peningkatan status dari Unit Pelayanan menjadi Badan Penanggulangan Kemiskinan ke Kemendagri dan ke Kemenpan RB dengansurat Bupati Sragen nomor 061/191/03/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dan 061/87/008/2014 tanggal 6 Mei 2014.

**Peluang replikasi:** UTPK telah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementrian PAN dan RB, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Sosial, Bappenas, maupun pihak-pihak perguruan tinggi negeri. Lembaga PBB seperti ILO dan UNICEF, lembagaasing seperti GTZ, serta Pemkab/Pemkot dan DPRD juga LSM-LSM dari daerah lain telah berkunjung ke UTPK untuk melaksanakan study banding dan kajian. Bupati Sragen dan Kepala UTPK juga kerap kali diundang untuk menjadi pembicara di berbagai Kementrian Nasional dan daerah. Terakhir lembaga Compassionate City (Kota Welas Asih) pimpinan Haidar Bagir ingin bekerja sama dengan UTPK Kabupaten Sragen. Jumlah tamu yang berkunjung ke UTPK sejak berdiri Mei 2012 sampai dengan September 2014 berjumlah 100 lebih dari semua unsur di atas.

Pembentukan **UTPK telah diapresiasi secara nasional** dengan mendapatkan penghargaan Top 33 Inovator Pelayanan Publik oleh **Kementrian Nasional Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**.

Oleh Bappenas, ide-ide dasar penanggulangan kemiskinan secara terpadu UTPK , yang sedikit banyak juga akan dimasukkan pada RPJMN 2014-2019. Artinya, kelak, cepat atau lambat, semua Pemkab/pemkot, mau tidak mau harus mengadopsi pelayanan terpadu dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

**Secara faktual, UTPK sedang direplikasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia** melalui Program Pandu Gempita, mulai bulan April 2013 sampai sekarang. Konsep Pandu Gempita (Pelayanan Terpadu Gerakan Peduli Kabupaten/Kota) oleh Kementerian Sosial mendapat contoh kongkrit lebih dahulu pada UTPK Kabupaten Sragen. Kementerian Sosial, melalui Kantor Wilayah di semua Propinsi mendorong semua Kabupaten/Kota untuk mendirikan UTPK. Oleh Kemensos, UTPK direkomendasi untuk menjadi rujukan nasional dan tujuan studi banding tentang Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, terutama pada Kabupaten/Kota lain lokasi Pandu Gempita yaitu Kabupaten Sukabumi, Payakumbuh, Bantaeng, Berau, dan lain-lain. Tercatat di Kabupaten Payakumbuh sudah didirikan UPTKAN yaitu Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari. Menteri Sosial sendiri berkenan mengunjungi UTPK dan meresmikan UTPK di 20 Kecamatan se Kabupaten Sragen.

## 12. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?

*“Paling banyak 500 kata, uraikan pengalaman umum yang anda peroleh dalam melaksanakan inisiatif ini, pembelajarannya serta rekomendasi anda untuk masa depan.”*

**Syarat Mutlak: Good will dan dukungan Kepala Daerah.** Penyelenggaraan pelayanan publik berkaitan dengan pengentasan kemiskinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, untuk itu diperlukan kepemimpinan yang kreatif, visioner dan berani mengambil keputusan. Pembentukan UTPK tidak terlepas dari peran kepemimpinan Bupati Sragen yang memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan perbaikan di bidang pelayanan publik.

**Pentingnya dukungan Legislatif.** Menindaklanjuti terbentuknya UTPK, DPRD Kabupaten Sragen membuat Perda Inisiatif tentang Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013, persetujuan anggaran operasional UTPK setiap tahunnya, dan meningkatnya anggaran penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya sejak berdiri UTPK.

**Pentingnya dukungan Satuan Kerja.** Inisiatif tidak akan berhasil tanpa dukungan Satuan Kerja pengampu program. Perubahan mindset bahwa program dan kegiatan dapat menjadi sebuah proyek basah yang memberikan tambahan penghasilan secara tidak sah bagi pengelola program, terpatahkan dalam pelayanan terpadu di UTPK. Terdapat beberapa kewenangan yang diserahkan pengelola program ke UTPK misalnya kewenangan memverifikasi dan merekomendasi. Satuan Kerja sangat terbantu kegiatannya.

Dukungan juga terlihat dalam penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) yang di dalamnya terdapat sinergi kegiatan dengan UTPK. Misalnya, Dinas Kesehatan menyusun Perbup tentang Program Saraswati, Dinas Sosial menyusun Perbup tentang Program RTLH dan Santunan Uang Duka Cita, dan Bagian Kesra Setda menyusun Perbup tentang Bantuan Beasiswa Mahasiswa Miskin PTN di Pulau Jawa.

**Kompleksnya permasalahan pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan.** Karakteristik program penanggulangan kemiskinan di UTPK sangat berbeda dengan program-program lain di Kabupaten Sragen. Menyangkut hampir sepertiga jumlah penduduk, dengan tingkat

pendidikan yang rendah, unskilled, dan berpendapatan rendah. Di samping itu, secara spesifik di lapangan, petugas menghadapi budaya masyarakat yang lebih suka dianggap miskin untuk mendapatkan pelayanan gratis. Tidak sedikit masyarakat mampu berusaha turun kelas menjadi miskin.

Apalagi ini dibuat dalam keterpaduan pelayanan. Sebagai konsekwensinya, maka yang harus ditangani adalah tidak hanya satu program tetapi semua program penanggulangan kemiskinan di semua Satuan Kerja. Meskipun sangat mendukung dan kooperatif, namun proses pemaduan tersebut tidak mudah. Perlu waktu dan melepas ego sektoral untuk tidak bekerja sendiri-sendiri.

**Pentingnya Kemitraan Pemerintah – Swasta – LSM yang Solid.** Kemitraan dengan Lembaga Swasta terutama Dunia Usaha sangat penting, terutama dalam hal membackup pendanaan program UPTPK yang sangat bergantung pada APBN dan APBD Propinsi/Kabupaten. Ini terlihat pada banyak kegiatan yang sumber dananya dari Biaya Promosi/CSR BUMN/BUMD/BUMS, misalnya RTLH, Mobil Operasional, Ambulance, Sembako Lansia Miskin.

Kemitraan dengan LSM solid. Kinerja positif LSM di Kabupaten Sragen menjadikan petugas UPTPK seobyektif mungkin, terutama dalam mengidentifikasi dan menentukan status warga miskin penerima manfaat layanan. Di samping itu banyak pula LSM dan Ormas yang ikut menyalurkan bantuannya melalui UPTPK karena sudah jelas data-data kemiskinannya di semua Kecamatan.

**Penguasaan Teknologi Informasi,** dalam penanggulangan kemiskinan sekalipun. Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan yang dimiliki UPTPK sangat membantu keberhasilan inisiatif ini.

**Rekomendasi untuk masa depan:** sebagai sebuah inovasi yang telah memberikan manfaat, ide-ide dasar UPTPK hendaknya diakomodasi dan direplikasi, meskipun tidak harus secara identik seperti pengalaman Kabupaten Sragen. Regulasi-regulasi yang dibuat oleh Pemerintah hendaknya dapat mengakomodasi inisiatif dan inovasi yang berasal dari daerah.